

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBD  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**Disusun Oleh:**

**DELA NAVARY**

**NIM: 4519012158**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi salah satu persyaratan**

**Guna memperoleh Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  
Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara

Nama Mahasiswa : Dela Navary

Stambuk/NIM : 4519012158

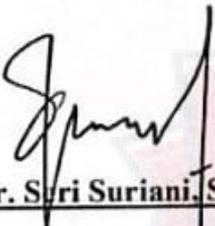
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Sri Suriani, SE., M.Si

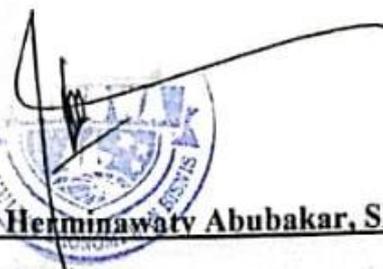
  
Dr. Muhammad Kharwi Yunus, SE., MM

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Manajemen

  
Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM.

  
Ahmad Jumarding, SE., MM.

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dela Navary

NIM : 4519012158

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  
Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 24 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan

  
Dela Navary

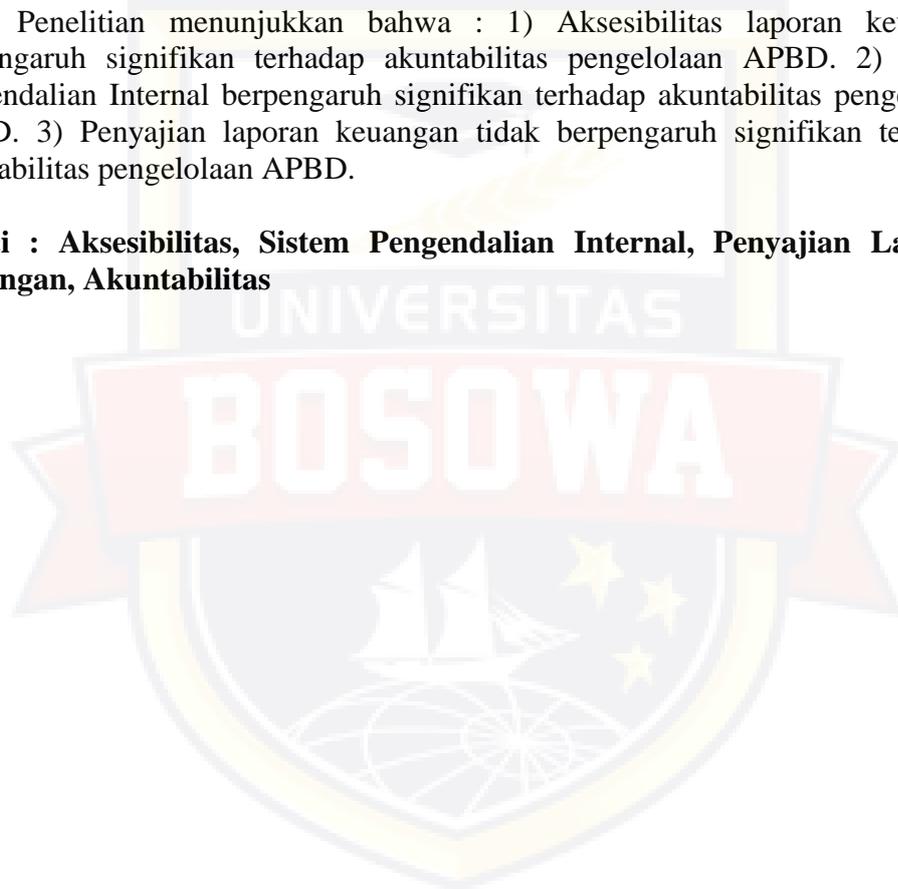
## **ABSTRAK**

DELA NAVARY. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara (Dibimbing oleh Dr. Seri Suriani, SE., M.Si dan Dr. Muhammad Kafrawi Yunus, SE., MM).

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara dengan mencakup Populasi dan Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 Responden. Pengumpulan data dengan menggunakan Kuisisioner sedangkan Analisis data menggunakan data regresi linear sederhana dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. 2) Sistem pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. 3) Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

**Kunci : Aksesibilitas, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas**



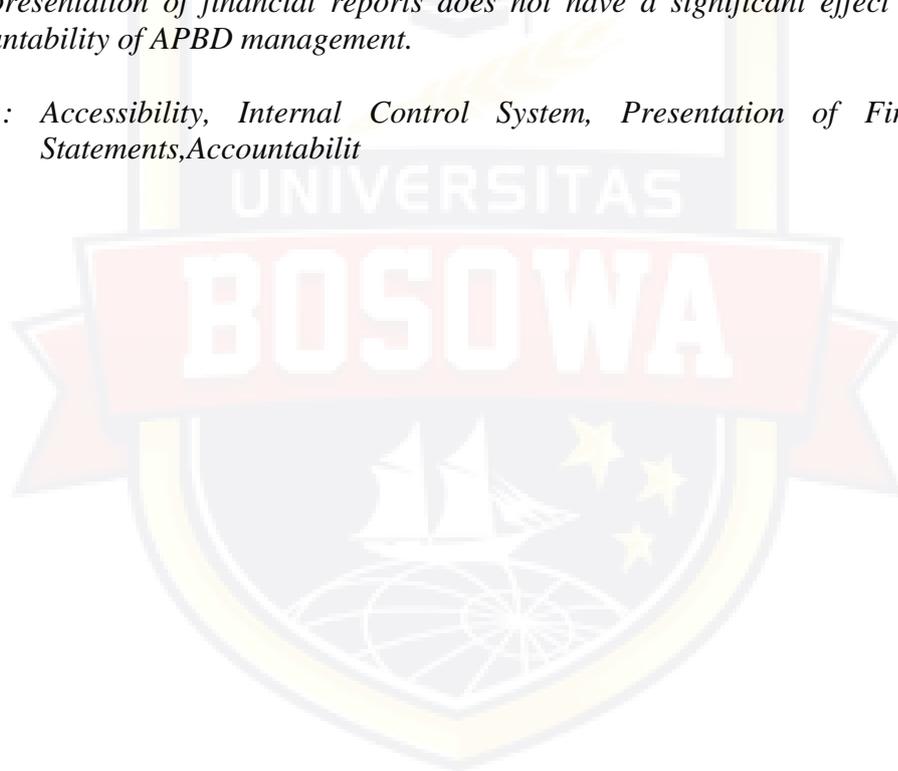
### **Abstrack**

DELA NAVARY. *Analysis of Factors Affecting the Accountability of North Toraja Regency APBD Management (Supervised by Dr. Seri Suriani, SE., M.Si and Dr. Muhammad Kafrawi Yunus, SE., MM).*

*This type of research is quantitative research aiming to determine the effect of APBD Management Accountability in North Toraja Regency by including the Population and Sample in this study amounting to 50 Respondents. Data collection using a questionnaire while data analysis using regression data using descriptive analysis and simple linear regression analysis.*

*The results of the study show that: (1) Accessibility to financial reports significantly influences APBD Management Accountability. (2) The Internal Control System has a significant effect on APBD Management Accountability. (3) The presentation of financial reports does not have a significant effect on the accountability of APBD management.*

*Key : Accessibility, Internal Control System, Presentation of Financial Statements,Accountabilit*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan APBD Kabupaten Toraja Utara** ”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, doa, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada penulis erikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, T., M.Si.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abubakar SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Ibu Indryani Nur, S.Pd., S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Ahmad Jumarding, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Ibu Dr. Seri Suriani, SE., M. Si dan Bapak Dr. Muhammad Kafrawi Yunus, SE., MM sebagai pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi

penulis

6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Bosowa
7. Teman-teman angkatan Universitas Bosowa, terkhusus kelas Manajemen-E yang menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Stevanus Situyu dan Ibu Mariana, beserta saudara-saudaraku tersayang Yulius Natan, Desi Febrianti, Korensia Devi, Evan Sandres Situyu dan segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselasaikan.
9. Terima kasih buat sahabat penulis Sutiani Kurapa dan Wandri Widya Wanti yang telah memberikan banyak dukungan ,motivasi, semangat dan setia menemani dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih buat teman-teman Titiek Munarty, Nirma Amir, William Eka Putra, Jelshy Christian, Yafet Sampe Pasang, Brigita dan Margareta yang telah memberikan dukungan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.
11. Terima kasih buat teman-teman KKN posko Desa Sangrabone yang selalu memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan do'anya. Kebaikan dan

ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan dari Tuhan Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depannya.

Makassar, 24 Juli 2023

Mahasiswa yang Bersangkutan

Dela Navary

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Lingkup Penelitian .....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Teori .....	7
1. Teori Agency .....	7
2. Manajemen Keuangan .....	9
3. Aksesibilitas Laporan Keuangan .....	11
4. Penyajian Laporan Keuangan .....	13

5. Sistem Pengendalian Internal.....	14
6. Akuntabilitas.....	19
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Instrumen Penelitian.....	31
E. Variabel Penelitian.....	31
F. Jenis dan Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
I. Definisi Operasional.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	37
1. Sejarah BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	37
2. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	40
3. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	41
B. Hasil Pengujian Hipotesis.....	44
1. Uji Validitas.....	44

2. Uji Realibilitas .....	46
3. Uji Statistik Deskriptif .....	47
4. Uji Asumsi Klasik.....	49
5. Uji Hipotesis .....	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	56
1. Akutabilitas Laporan keuangan terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara.....	57
2. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara.....	57
3. Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	43
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi Instrumen.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas .....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik deskriptif.....	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data.....	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas .....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	53
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Akuntabilitas Keuangan .....	20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD .....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep Akuntabilitas bukanlah hal yang baru di sektor publik Indonesia, seluruh instansi pemerintahan pada tingkatan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah menekankan penerapan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administratif pemerintahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada publik (Julia dan Wahidahwati, 2020). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan negara, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 tahun 1999). Pemerintahan memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya ekonomi sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dan pihak lain yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut (Artini dan Putra, 2020).

Mengacu paada teori keagenan (*agency theory*), akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawaban (Kholmi, 2010). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang Amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Haryanto *et al.*,2007). Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), pengelolaan keuangan harus diawasi dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indraswari dan Rahayu,2021).

Akuntabilitas pengelolaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azizah *et al.*,2015; Hardiningsih *et al.*, 2019; Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bagian penting dalam terlaksananya pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah seharusnya program pembangunan sudah dimuat dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah supaya program pembangunan tersebut dapat dibiayai dan dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat terarah dan di kontrol.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari - 31 Desember, maka dari itu dalam satu tahun anggaran tersebut harus dapat di realisasi sehingga perencanaan keuangan tersebut dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Akuntabilitas Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap Tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu tahun periode. Akuntabilitas Pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah . Akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas menurut Lawton dan Rose (2000:10) dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Sementara itu, HAW. Widjaja (2005:155) mengartikan laporan pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya HAW. Widjaja (2005:155) menyatakan fungsi dari pelaporan yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau mandate untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan urian diatas , maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBD KABUPATEN TORAJA UTARA”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara
2. Untuk menguji pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas APBD Kabupaten Toraja Utara
3. Untuk menguji penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Toraja Utara

2. Dapat memberikan masukan bagi pegawai pemerintahan daerah Kabupaten Toraja Utara dan sebagai bahan pertimbangan dalam memperhatikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

#### **E. Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yakni dengan melakukan survei secara langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini hanya mencakup Aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan akan disusun ke dalam karya tulis ilmiah (Skripsi) dengan rancangan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAU PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudia dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, instrument, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

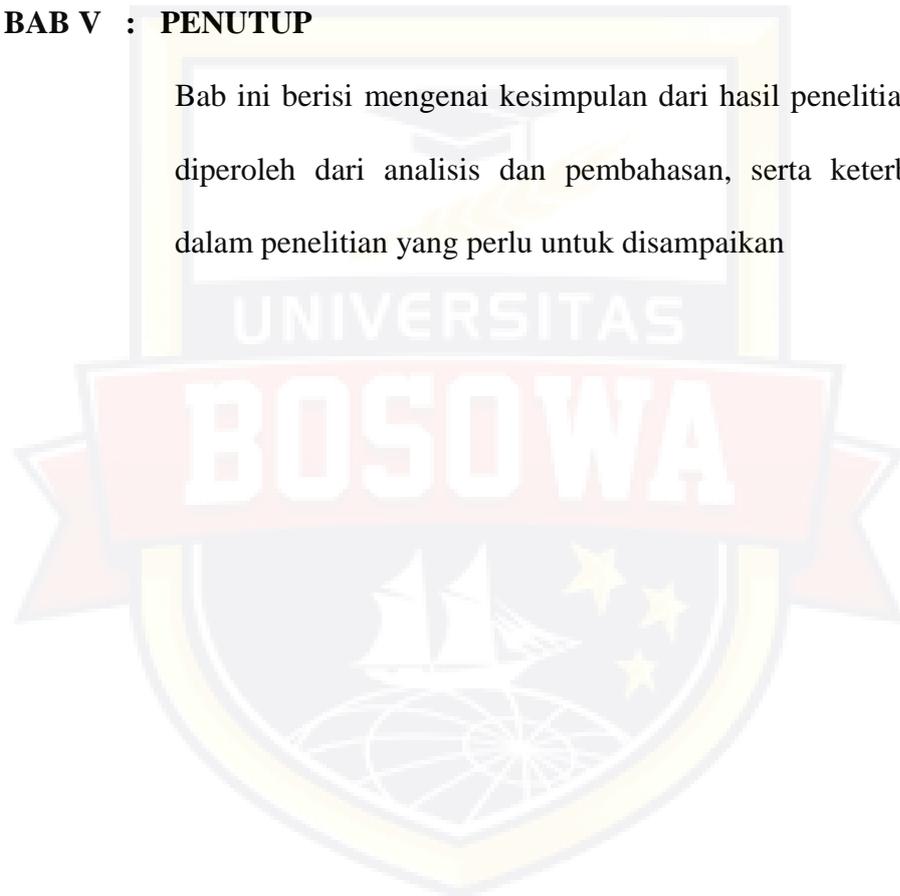
dan jadwal penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terisi dari gambaran umum lokasi penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta keterbatasan dalam penelitian yang perlu untuk disampaikan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Agency**

Agency Theory atau teori agensi merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara berbagai kelompok. Teori agensi adalah suatu arah yang baru tentang keagenan. Korporasi adalah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis sesuai kontrak yang ada antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan.

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (principal) dan manajemen organisasi (agency). Di dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengemban tugas untuk memberikan pelayanan

publik. Namun, dalam prakteknya pemerintah terkadang bertindak di luar dari fungsinya dengan membatasi akses informasi masyarakat. Pembatasan tersebut menimbulkan konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara agen dan principal.

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Hubungan teori agensi terhadap akuntabilitas adalah memberikan informasi dari pusat kepada daerah yang mana data-data bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana , teori keagenan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam proses pengelolaan dana . Secara umum pada teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Halim dan Abdullah, 2006). Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. gency problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent

Konsep Agency Theory menurut Scott (2015 : 125) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan

principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori agensi adalah hubungan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajer). Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak principal memberi wewenang kepada agent untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

## 2. Manajemen Keuangan

### a. Definisi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu ilmu utama dari manajemen. Manajemen keuangan pada awalnya hanya mengutamakan kegiatan mendapatkan/memperoleh dana saja hingga mencakup kegiatan mendapatkan, penggunaan dana hingga sampai ke pengelolaan aset (aktiva)

Menurut Irham Fahmi (2016:2) manajemen keuangan adalah Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Dadang Prasetyo Jatmiko (2017:1) manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan.

#### **b. Tujuan Manajemen Keuangan**

Tujuan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer keuangan.

Menurut Fahmi (2014:4) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan manajemen keuangan yaitu:

- 1) Memaksimalkan nilai perusahaan
- 2) Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali
- 3) Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang.

Dari 3 (tiga) tujuan tersebut yang paling utama adalah yang pertama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Pemahaman memaksimalkan nilai perusahaan adalah bagaimana pihak manajemen perusahaan mampu memberikan nilai yang maksimum pada saat perusahaan masuk ke pasar.

#### **c. Fungsi Manajemen Keuangan**

Tugas utama manajemen keuangan adalah mengambil keputusan yang mencakup perusahaan dalam memperoleh dana dan juga cara mengalokasikan dana tersebut. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) *Planning* atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba.
- 2) *Budgeting* atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki
- 3) *Controlling* atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan system keuangan perusahaan.
- 4) *Auditing* atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
- 5) *Reporting* atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.

### 3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

#### a. Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam system informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang dalam mendapatkan informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Pemerintah daerah harus memberikan akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 21 tahun 2010).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan yang diberikan dalam mendapatkan laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah

#### **b. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Terdapat 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan (Wahida, 2015), yaitu:

- 1) Terbuka di media massa Laporan Keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.
- 2) Mudah diakses Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet (website).
- 3) Ketersediaan informasi Informasi laporan keuangan yang dipublikasi secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan

#### 4. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan kompoen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

## 5. Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian internal pemerintah mulai berjalan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana terdapat 5 (lima) unsur dalam SPIP yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian.

Unsur lingkungan pengendalian sebagai fundamen SPIP karena unsur ini merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja yang membentuk suasana/gaya (*sets the tone*) organisasi. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud diciptakan oleh pimpinan instansi pemerintah melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko dimaksud terdiri dari (Pasal 13 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008):

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisis risiko

Penilaian risiko tersebut dilakukan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah hingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah

c. Kegiatan Pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan

pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Daftar uji berikut ini dimaksudkan untuk menilai tercapai tidaknya suatu lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Penerapan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008):

- 1) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- 2) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;  
kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- 3) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- 4) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- 5) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

#### d. Komunikasi dan Informasi

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Komunikasi dan informasi wajib diselenggarakan dengan efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (Pasal 42 PP Nomor 60 tahun 2008).

#### e. Pemantauan

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam

pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

## 6. Akuntabilitas

### a. Definisi Akuntabilitas

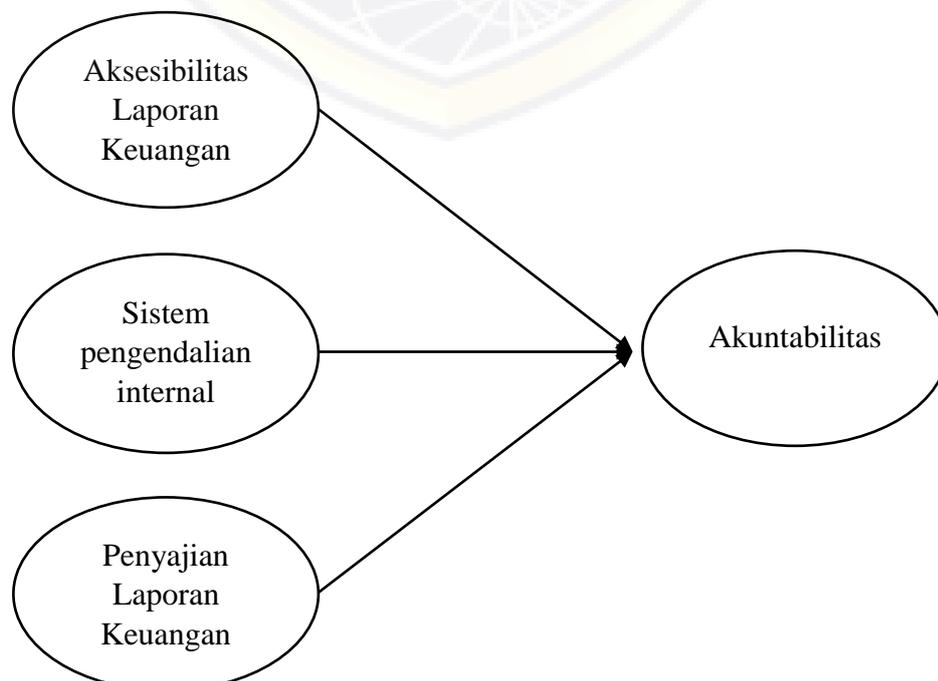
Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan.

Webster (Waluyo 2007:203) mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

**Gambar 2.1**

**AKUNTABILITAS KEUANGAN**



## **b. Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Berdasarkan jenisnya akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) dapat dibedakan melalui:

### 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertical (internal) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah. Setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodic maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

### 2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*public or external accountability and environment*).

## **7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **a. Definisi APBD**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu

tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98) “Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

#### **b. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD**

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:60), pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut:

##### 1) Pihak Eksekutif

Pihak-pihak yang terlibat dalam pihak eksekutif yaitu terdiri dari:

##### a) Bupati/Walikota

Sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan public.

##### b) Sekretaris Daerah (Sekda)

Sebagai koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD). Kebijakan umum

anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

c) Tim Anggaran Eksekutif

Ketuanya adalah Sekretaris Daerah yang bertugas untuk Menyusun kebijakan umum anggaran dan mengkompliksikan rncana kerja anggaran setiap satuan kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.

d) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD adalah unit kerja pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan.

e) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

f) Bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai berndahara umum daerah. BPKD bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2) Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain:

a) Panitia Anggaran Legislatif

Suatu tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.

b) Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintah, perekonomian dan pembanugnan, kseuangan, investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat.

**c. Prinsip Pengelolaan APBD**

Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

- 1) Kesatuan, Asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- 2) Universalitas, Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- 3) Tahunan: Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu

- 4) Spesialitas, Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Akrual, Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar/belum diterima kas
- 6) Kas, Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke Kas Daerah.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Digunakan	Hasil Peneliti
1	(Amira Intania permata, M.Thoyib, M.Husna Mubarok, 2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan	Terdapat Pengaruhi secara parsial yang positif dan signifikan antara <i>value for money</i> , penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi

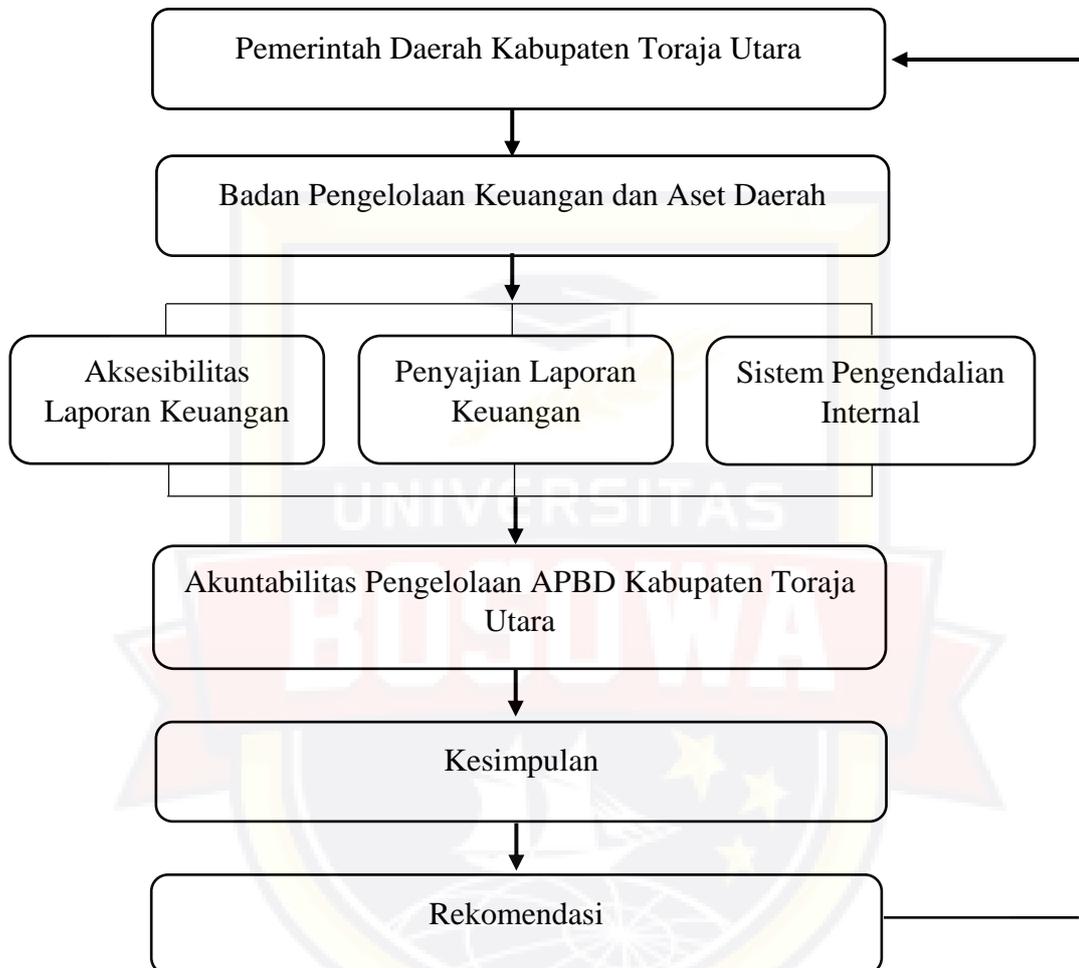
			Sumatera Selatan .
2	(Yona Wida Pramudita, 2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	(Ike Roza Mardian, Yurniwati, 2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Hasil penelitian menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap

		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19
4	(Joni Gohora, Florence D.J. Lengkong, Novva N.Plangiten, 2018)	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara</p> <p>Akuntabilitas pengelolaan APBD di daerah kabupaten halmahera utara dari aspek kejujuran dan hukum belum terlalu baik, ini di lihat dari masi adanya penyalagunaan wewenang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum masih kurang baik sehingga tidak tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Prosedur yang digunakan dalam mendorong jalannya tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kabupaten halmahera utara belum terlalu baik karna alat penunjang yang digunakan belum terlalu lengkap.</p>

### C. Kerangka Pikir

Gambar 2.2

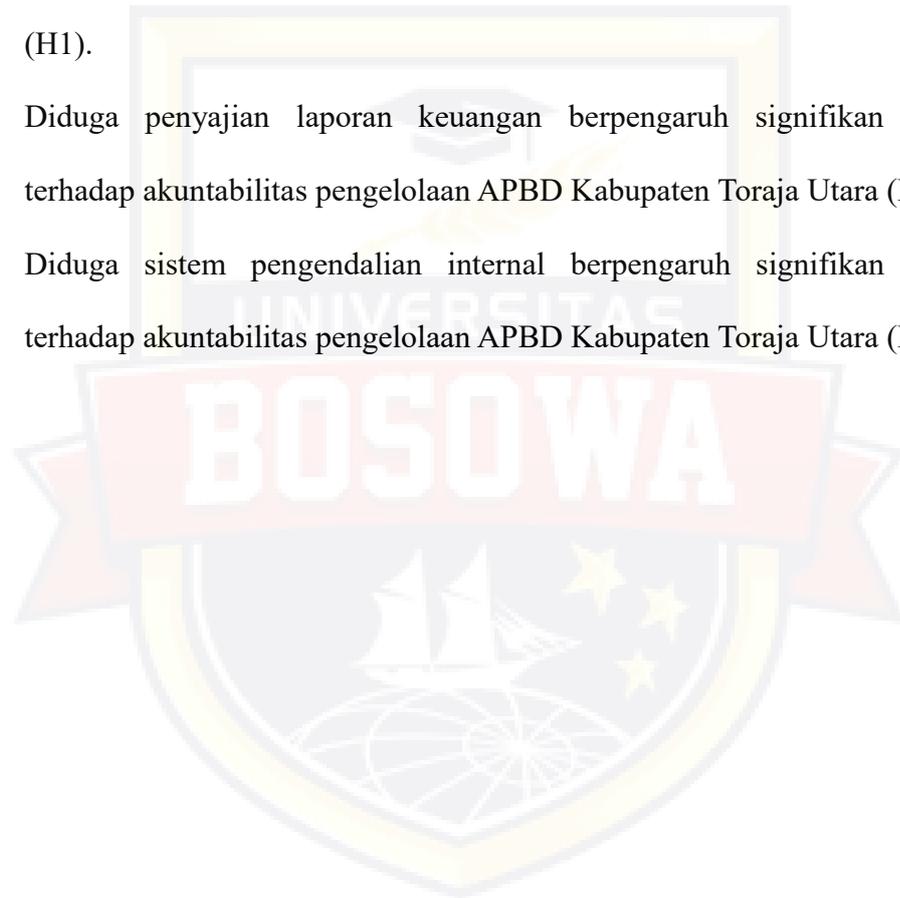
#### Kerangka Pikir



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara (H1).
2. Diduga penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara (H2).
3. Diduga sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara (H3).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variable dalam sampel atau populasi melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan langsung kepada pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### **B. Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data yang valid dan akurat, maka penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2019:126) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yakni Pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berjumlah 50 orang.

##### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam peneliti ini populasi dan sampel jenuh yang diambil adalah seluruh pegawai kantor

BPKAD Kabupaten Toraja Utara yang jumlah populasi sebanyak 50 orang.

Menurut Sugitono (2019) Sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam proses penelitian guna memperoleh data pendukung dalam melakukan suatu penelitian. Instrumen penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi. Instrumen ini memiliki peranan serta kegunaan yang sangat penting dikarenakan bila kita mempunyai instrumen dalam mendapatkan data penelitian, maka dapat mengakibatkan kita salah dalam mengambil pengelompokan dan pengolahan data yang relevan dalam penelitian tersebut.

#### **E. Variabel Penelitian**

##### **1. Variabel Bebas/*Independen* (X)**

Menurut Sugiyono (2018:39) Variabel independent atau Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab atau munculnya variable dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas yaitu Aksesibilitas, penyajian laporan keuangan, Sistem pengendalian internal

## 2. Variabel Terikat/*Dependen* (Y)

Menurut Sugiyono (2018:39) Variabel dependen atau Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas

### **F. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung beberapa angka-angka yang didapat dari jawaban responden pada angket penelitian.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi tentang Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### 2. Sumber data

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder adalah berbagai macam dokumen-dokumen, arsip, dan buku yang terkait dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas dua yakni observasi dan angket (kuesioner) , yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. *Observasi* adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian agar diperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti.
2. *Kuesioner* adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan beberapa pertanyaan kepada setiap responden dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) uji statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi dan perhitungan presentase.

### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Untuk perhitungan uji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda variabel x dan y dengan menggunakan rumus sebagai berikut Arikunto (dalam Mardiana, 2014, hal. 28) :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Di mana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

X1 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

X2 = Penyajian Laporan Keuangan

X3 = Sistem Pengendalian Internal

a = Konstanta

b1 dan b2 = Koefisien regresi yang dicari

e = Kesalahan pengganggu

## I. Definisi Operasional

**Tabel 3.1**

### **DEFINISI OPERASIONAL**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
<b>Akuntabilitas</b>	Akuntabilitas adalah proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah	1. perumusan rencana keuangan 2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan 3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan 4. Pelaksanaan laporan keuangan	(Halim,2007)
<b>Sistem pengendalian</b>	Sistem pengendalian internal merupakan	1. Struktur organisasi	(Prastiti & Aziz, 2019)

<b>internal</b>	sistem pengendalian internal yang diimplementasikan pada semua unsur di lingkungan pemerintah pusat dan daerah serta memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.	2. Keamanan peralatan dan persediaan desa 3. sistem pendukung 4. Komunikasi	
<b>Aksesibilitas</b>	Aksesibilitas adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.	1. Terbuka dimedia massa 2. Mudah diakses 3. Ketersedian Informasi	(Nurmuthmainnah 2015)
<b>Penyajian</b>	Penyajian laporan	1. Relevan	(Peraturan Pemerintah No.71

---

<b>Laporan</b>	keuangan	2. Andal	tahun 2010)
<b>Keuangan</b>	merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.	3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	

---

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM BKAD KABUPATEN TORAJA UTARA**

##### **1. Sejarah BKAD Kabupaten Toraja Utara**

Kabupaten Toraja Utara adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Ibu kotannya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Rantepao adalah sebuah Kecamatan dikabupaten Toraja Utara juga sebagai pusat budaya suku Toraja. Kota Rantepao dilalui oleh sungai Sa'dan yang memberikan sumber air bagi pertanian dan peternakan di Rantepao dan wilayah sekitarnya. Luas wilayah 1217,98 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 21 Kecamatan. Rantepao sebagai ibukota dikelilingi oleh perbukitan dengan pemandangan yang asri dan indah dan persawahan sebagai kota administratif Pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk Tahun 2017 pemisahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), yang mempunyai fungsi penunjang keuangan pemerintahan daerah merupakan bagian dari integral dari sejumlah OPD bergerak bersama dengan senantiasa memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan

perekonomian daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang menuntut adanya perubahan mendasar di dalam segala aspek kehidupan termasuk perubahan didalam system pemerintahan di daerah yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi yang ditandai dengan adanya pergerakan beberapa keuntungan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah memberikan kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan paradigma baru bagi pengembangan otonomi sebenarnya. Dengan undang-undang ini pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, memperhatikan keanekaragaman daerah dan kearifan lokal setiap daerah. Pemerintah daerah yang selama ini berfungsi sebagai pelaksana sebagian kecil kegiatan pembangunan di daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga melaksanakan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi. Dengan kata lain daerah akan mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan memepertanggungjawabkan sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

Kabupaten Toraja Utara berhasil mempertahankan predikat WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2017. Ini adalah ketiga kalinya berturut-turut Pemerintah Kabupaten Toraja

Utara meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan diberikan langsung oleh BPK RI perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan di kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Makassar.

Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang. S.E., M.Si mengucapkan terima kasih kepada seluruh eksekutif, legislative dan masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah sehingga mampu 3 Tahun berturut-turut bisa mempertahankan predikat WTP dalam laporan Keuangan dari BPK RI perwakilan SUL-SEL. Menurut Bupati Toraja Utara, predikat WTP tersebut merupakan kesuksesan bersama. WTP merupakan sebuah capaian dari kerja keras maupun kerja kolektif dari semua pihak di PEMKAB Toraja Utara.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Penyelenggara Keuangan daerah memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, menolong pelaksanaan tatakelola Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Hal ini penting guna meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah daerah menuju terwujudnya *Good Government*.

## 2. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Toraja Utara

### 1) Visi

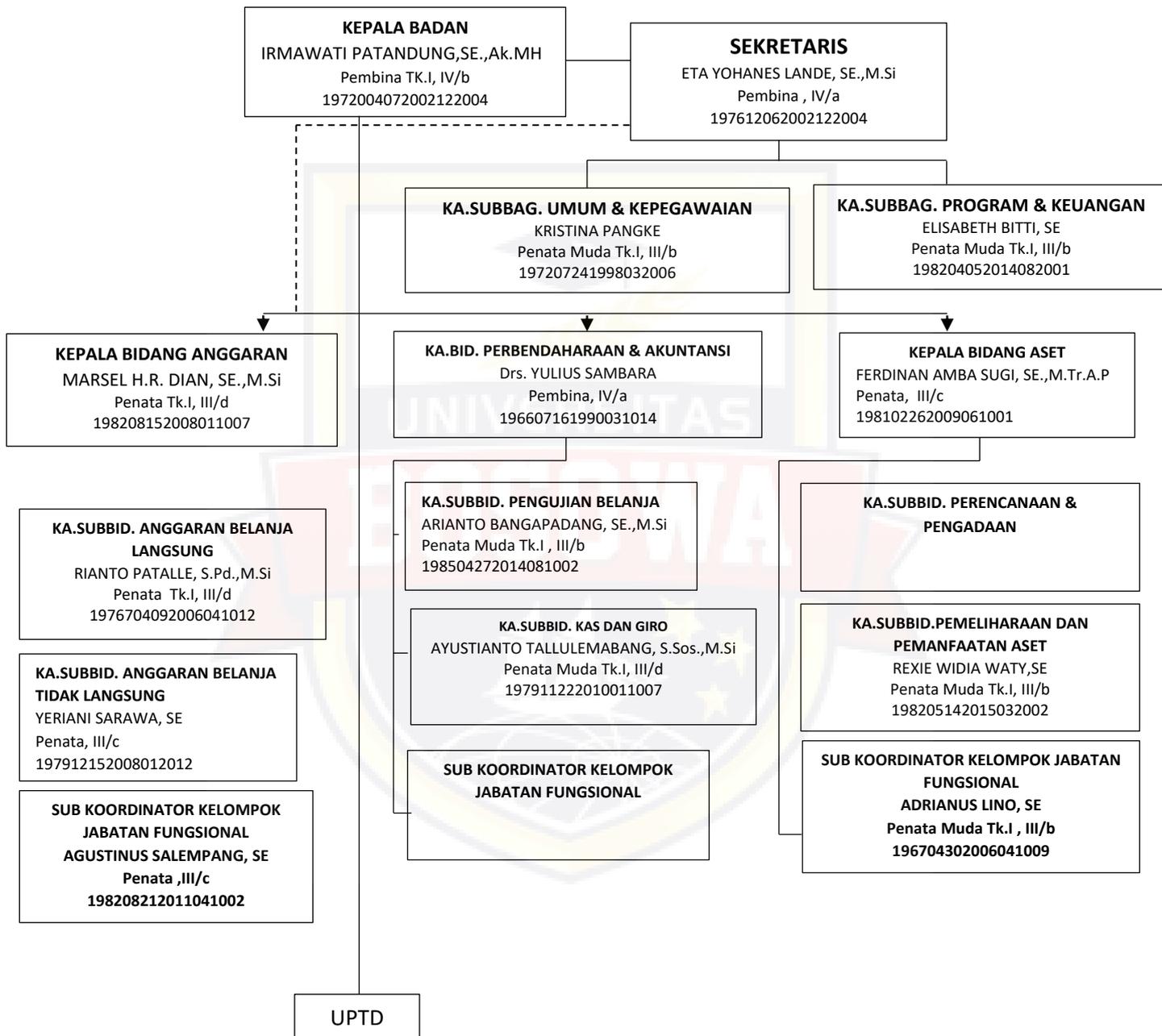
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkarakter

### 2) Misi

- a) Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan, actual, efektif dan efisien.
- b) Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d) Mengembangkan Sistem manajemen dan tata Kelola asset yang akurat dan akuntabel,

### 3. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD**



## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berikut dibawah ini merupakan deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

	Umur	Valid		
		Frequency	Percent	Percent
Valid	21-30 Tahun	3	6,0	6,0
	31-40 Tahun	14	28,0	34,0
	41-50 Tahun	18	36,0	70,0
	51-60 Tahun	15	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan pada tabel 4.1 yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat 50 responden yang mengisi kuesioner penelitian yang terbagi mulai dari usia 21 tahun sampai dengan usia 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai yang mengisi kuesioner penelitian berkisar umur 41-50 tahun sebanyak 18 pegawai (36%).

### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Jenis_Kelamin		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	LAKI-LAKI	41	82,0	82,0	82,0
	PEREMPUA	9	18,0	18,0	100,0
N					
Total		50	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas terlihat bahwa responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 41 orang atau dengan presentase 82,0% sedangkan Perempuan 9 orang responden dengan presentase 18,0%.

#### 4.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskriptif Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

		Pendidikan		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	SMK	4	8,0	8,0	8,0
	S 1	31	62,0	62,0	70,0
	S 2	15	30,0	30,0	100,0
Total		50	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2023

Dilihat pada tabel 4.3 diatas lihat bahwa dari 50 orang responden 4 Orang (8,0%) diantaranya memiliki pendidikan terakhir SMK, kemudian 21 orang 62 (%) diantaranya memiliki pendidikan terakhir S1, sedangkan 15 orang ( 30,0%) memiliki pendidikan terakhir S2

#### 4.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Deskriptif Karakteristik responden berdasarkan Masa kerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Masa_Bekerja		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	1-5 Tahun	4	8,0	8,0	8,0
	6-15 Tahun	16	32,0	32,0	40,0
	16-25 Tahun	17	34,0	34,0	74,0
	26-35 Tahun	13	26,0	26,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2023

Dilihat pada tabel 4.4 diatas lihat bahwa dari 50 orang responden 4 orang (8,0%) bekerja kurang lebih 1-5 tahun, kemudian 16 orang (32,0%) Telah bekerja 6-15 tahun, dan 17 orang (34,0%) telah bekerja selama 16-25 tahun dan paling banyak yang sudah hampir pensiun sebanyak 13 orang yang telah bekerja selama 26-35 tahun (26,0 %).

## B. Hasil Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Validitas

Uji validitas menentukan apakah survei dapat diandalkan atau tidak.

Jika pertanyaan survei menunjukkan sesuatu yang diukur oleh survei, maka survei tersebut dikatakan sah. Bandingkan nilai korelasi keseluruhan (angka R) dari korelasi unsur dengan hasil perhitungan tabel R untuk menentukan uji validitas. Nilai valid jika angka R melebihi larik R dan bernilai positif..

- a. Apabila :  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , Dengan kata lain, pernyataan atau sinyal tersebut benar.
- b. Apabila :  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ , itu menunjukkan bahwa pernyataan atau indikator tersebut masih valid

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi Instrumen**

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	rTabel (n=100)	Keterangan
<b>Aksesibilitas Laporan Keuangan ( X1 )</b>	X1.1	0.719	0.278	Valid
	X1.2	0.687		Valid
	X1.3	0.563		Valid
	X1.4	0.607		Valid
	X1.5	0.598		Valid
	X1.6	0.630		Valid
	X1.7	0.596		Valid
	X1.8	0.636		Valid
	X1.9	0.723		Valid
	X1.10	0.436		Valid
<b>Sistem Pengendalian Internal (X2)</b>	X2.1	0.473	0.278	Valid
	X2.2	0.758		Valid
	X2.3	0.453		Valid
	X2.4	0.433		Valid
	X2.5	0.367		Valid
	X2.6	0.795		Valid

	X2.7	0.527		Valid
	X2.8	0.377		Valid
	X2.9	0.501		Valid
	X2.10	0.758		Valid
<b>Penyajian Laporan Keuangan (X3)</b>	X3.1	0.530		Valid
	X3.2	0.694		Valid
	X3.3	0.524	0.278	Valid
	X3.4	0.614		Valid
	X3.5	0.459		Valid
	Y1	0.722		Valid
	Y2	0.687		Valid
	Y3	0.561		Valid
	Y4	0.599		Valid
<b>Akuntabilitas (Y)</b>	Y5	0.603	0.278	Valid
	Y6	0.666		Valid
	Y7	0.601		Valid
	Y8	0.627		Valid
	Y9	0.718		Valid
	Y10	0.441		Valid

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.5 rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai Correlation atau nilai r hitung untuk masing-masing variabel berada  $> 0.278$ . Ini menunjukkan bahwa data tersebut valid karena memenuhi asumsi Uji Validitas.

## 2. Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas merupakan tolak ukur suatu kuesioner yang berupa indikator dan variable. Dapat dikatakan Reliabel jika kuesioner esponden konsisten pada waktu yang panjang. Variabel dapat dikatakan reliable jika

memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0.60

**Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai	Keterangan
Aksesibilitas Laporan Keuangan ( X1 )	0.801	>0.6	<i>Reliabel</i>
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.726	>0.6	<i>Reliabel</i>
Penyajian Laporan Keuangan (X3)	0.655	>0.6	<i>Reliabel</i>
Akuntabilitas (Y)	0.803	>0.6	<i>Reliabel</i>

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Semua Dari hasil Uji realibilitas pada tabel 4.6 Menunjukkan hasil hituing pada Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) 0.801 , Sistem Pengendalian Internal (X2) 0.726, Penyajian Laporan Keuangan (X3) dan hasil hitung pada Akuntabilitas (Y) 0.803 ini menunjukkan masing-masing variabel tersebut layak di uji.

### 3. Uji Statistik Deskriptif

Dalam mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang variabel ini, maka harus dibuat ukuran statistik deskriptif yang mencakup nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai rata-rata (Max), nilai terendah (Min), dan standar pembagian dari variabel berikut.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Aksesibilitas_Laporan_Keuangan	50	28	50	41,14	4,305
Sistem_Pengendalian_Internal	50	32	46	38,28	2,756

Penyajian_Laporan_Keuangan	50	16	23	19,58	1,326
Akuntabilitas	50	28	50	41,20	4,324
Valid N (listwise)	50				

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Distribusi data yang peneliti kumpulkan dapat dirangkum menggunakan temuan tes deskriptif yang disajikan sebelumnya:

- a. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan X1 bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum minimum 28, sedangkan nilai maximum 50, dan standart deviasi datanya adalah 4.305
- b. Variabel Aksesibilitas Sistem pengendalian internal X2 di deskripsikan bahwa nilai minimum minimum 32, sedangkan nilai maximum 46, dan standart deviasi datanya adalah 2.756
- c. Variabel Penyajian laporan keuangan X3 di deskripsikan bahwa nilai minimum minimum 16, sedangkan nilai maximum 23, dan standart deviasi datanya adalah 1.326
- d. Variabel Akuntabilitas Y di deskripsikan bahwa nilai minimum minimum 28, sedangkan nilai maximum 50, dan standart deviasi datanya adalah 4.324
- e. Variabel Pengendalian internal (X3) memiliki jumlah sampel 33, dengan nilai minimum 32, nilai maximum 48, dan mean 38.83

#### **4. Uji Asumsi Klasik**

Tes Penerimaan Klasik adalah sumber yang berharga untuk menganalisis berganda regresif. Untuk memastikan estimasi parameter dan

koefisien regresi akurat, pengujian ini harus diselesaikan. Tiga komponen hipotesis klasik adalah normalitas, multikolinieritas, dan linieritas. Hasil investigasi penelitian ini terhadap uji hipotesis dirangkum di bawah ini.:

#### a) Uji Normalitas

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan normalitas data. dengan mengevaluasi signifikansi residual dan representasi grafis dari sebuah kurva probabilitas yang dinormalisasi. Periksa distribusi data (skor) melintasi diagonal dan plot untuk menentukan normalitas. Data yang tersisa setelah normalisasi disediakan:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,41986040
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,413
	Positive	,413
	Negative	-,097
Test Statistic		,413
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Terlihat dari hasil Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,200. hasil uji Normalitas diketahui nilai signifikansinya yaitu  $0,200 > 0,5$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residul berdistribusi normal.

#### b) Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan suatu uji yang diperlukan untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi di antara variabel yang sedang diteliti. Uji ini merupakan uji untuk melihat apakah ada hubungan linear yang signifikan dari dua buah variabel yang sedang diteliti (Wibowo dan Wulandari 2020)

**Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas**

Variabel	Nilai sig	Nilai	Hubungan
Aksesibilitas Laporan Keuangan ( X1 )	0.954	> 0.05	Linear
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.763	> 0.05	Linear
Penyajian Laporan Keuangan (X3)	0.914	> 0.05	Linear

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai sig kinerja terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan 0.954 > 0.05, Sistem Pengendalian Internal 0.763 > 0.05, dan kinerja terhadap Penyajian Laporan Keuangan 0.054 > 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki hubungan linear.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis data regresi berganda diolah

melalui aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution). Menurut Sugiyono (2018), penelitian ini menggunakan dua variabel bebas sehingga memiliki persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Berikut merupakan hasil uji analisis regresi linier berganda: **Analisis**

**Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,1261	1,286		,403	,840
Aksesibilitas_Laporan_Keuangan	,492	,116	,388	6,474	,000
Sistem_Pengendalian_Internal	,248	,025	,214	3,874	,000
Penyajian_Laporan_Keuangan	,237	,051	-,047	,529	,001

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Dari perhitungan regresi linear berganda pada tabel 4.15, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 1.261 - 0.492X_1 + 0.248X_2 + 0.237 X_3 + \varepsilon$$

Penjelasan dari persamaan yaitu sebagai berikut :

- a. Konstanta ( $\beta$ ) = 1.261

Apabila nilai variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan = 0, maka nilai tetap atau nilai awal Akuntabilitas adalah 1.261

- b. Koefisien Regresi untuk Aksesibilitas Laporan Keuangan = 0.492

Nilai koefisien regresi untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari variabel Aksesibilitas Laporan

Keuangan sebesar satu satuan, maka akan menurunkan Akuntabilitas sebesar 0.492 satuan, dengan artian semakin tinggi Aksesibilitas Laporan Keuangan maka Akuntabilitas akan meningkat.

- c. Koefisien Regresi untuk Sistem Pengendalian Internal = 0.248

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Akuntabilitas sebesar 0.248 satuan, dengan artian semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka Akuntabilitas akan meningkat.

- d. Koefisien Regresi untuk Variabel Penyajian Laporan Keuangan = 0.237

Nilai koefisien regresi untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari variabel Penyajian Laporan Keuangan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Akuntabilitas sebesar 0.237 satuan, dengan artian semakin tinggi Penyajian Laporan Keuangan maka Akuntabilitas akan meningkat.

#### **b. Uji T**

Uji t digunakan untuk mengukur secara satu persatuan antara variabel independen yaitu aksesibilitas, system pengendalian internall dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Uji t bertujuan untuk membandingkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Variabel independen dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05.

**Tabel 4.11 Hasil Uji T  
Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,1261	1,286		,403	,840
Aksesibilitas_Laporan_Keuangan	,492	,116	,388	6,474	,000
Sistem_Pengendalian_Internal	,248	,025	,214	3,874	,000
Penyajian_Laporan_Keuangan	,237	,051	-,047	,529	,001

Berdasarkan tabel 4.11 variabel Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan akan dijelaskan masing masing pengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan sebagai berikut:

- 1) Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan berdasarkan tabel 4.11 hasil pengujian menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai t hitung  $6,474 > t$  tabel 1,684. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa stres kerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas, sehingga H1 diterima. Nilai t yang bernilai 6.474 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat Positif terhadap variabel dependen.
- 2) Variabel Sistem Pengendalian Internal berdasarkan tabel 4.11 hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dan t hitung  $3,874 > t$  tabel 1,684. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara parsial t

berpengaruh terhadap Akuntabilitas, sehingga H2 diterima. Nilai t yang bernilai + 3.874 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

- 3) Variabel penyajian laporan keuangan berdasarkan tabel 4.11 hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$  dan t hitung  $0,529 < t$  tabel 1,684. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas, sehingga H3 ditolak. Nilai t yang bernilai + 529 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

#### c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan dilakukan Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan antara variabel Laporan Keuangan (X1), variabel Sistem Pengendalian Internal (X2), Penyajian Laporan Keuangan (X3) dan Akuntabilitas (Y). Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016):

1. Jika nilai signifikan  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

**Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	907,362	3	302,454	61.688	,000 <sup>b</sup>
	Residual	8,638	46	,188		
	Total	916,000	49			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Pada penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui secara simultan pengaruh Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas. Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai Fhitung  $61.688 > 2.560$  (Ftabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan mempunyai pengaruh yang secara simultan atau bersama-sama terhadap akuntabilitas.

#### **d. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Menurut Imam Ghozali (2016) Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai r<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen. Kriteria pengujiannya menurut Sugiyono (2017) yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai  $r^2$  mendekati 0 maka pengaruhnya semakin kecil.
- 2) Jika nilai  $r^2$  mendekati 1 maka pengaruhnya semakin kuat.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 <sup>a</sup>	,891	,890	,433

a. Predictors: (Constant), Penyajian\_Laporan\_Keuangan, Aksesibilitas\_Laporan\_Keuangan, Sistem\_Pengendalian\_Internal

Dari tabel 4.13 diperoleh hasil bahwa hubungan antar variabel adalah sebesar nilai Adjusted R square yaitu 0.890 atau 89.0%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 89.0% terhadap variabel Akuntabilitas. Sedangkan 11.0% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### **C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi dari variabel APBD, Laporan keuangan daerah, system pengendalian internal terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut dengan memberikan interpretasi antara hasil analisis yang dicapai dengan teori yang mendasari penulisan, penjelasan ini diperlukan agar dapat diketahui kesesuaian teori dengan hasil penelitian yang dicapai. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis diperoleh bahwa kedua hipotesis yang diajukan semua memiliki signifikan, dengan kata lain ada dua hipotesis yang diterima dengan signifikan, untuk mengetahui bagaimana keadaan pengaruh antara variabel APBD, Laporan keuangan daerah, system pengendalian internal terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara dapat dijabarkan sebagai berikut

#### **1. Akutabilitas Laporan keuangan terhadap Pengelolaan APBD**

##### **Kabuapten Toraja Utara**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, Nilai T yang diperoleh adalah 6,474 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima a. Hal ini mengintimidasi bahwa Aksebilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel Aksebilitas Laporan Keuangan lebih kecil dari 0,05.

#### **2. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan APBD**

##### **Kabupaten Toraja Utara**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, Nilai signifikan yang diperoleh adalah 3,574 karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima dan Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya Pengendalian Internal, maka semakin baik pula tingkat Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara.

### 3. Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan APBD

#### Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, Nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,529 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditandai dimana  $0,529 < 1,684$ .



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis faktor faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kabuten Toraja Utara dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

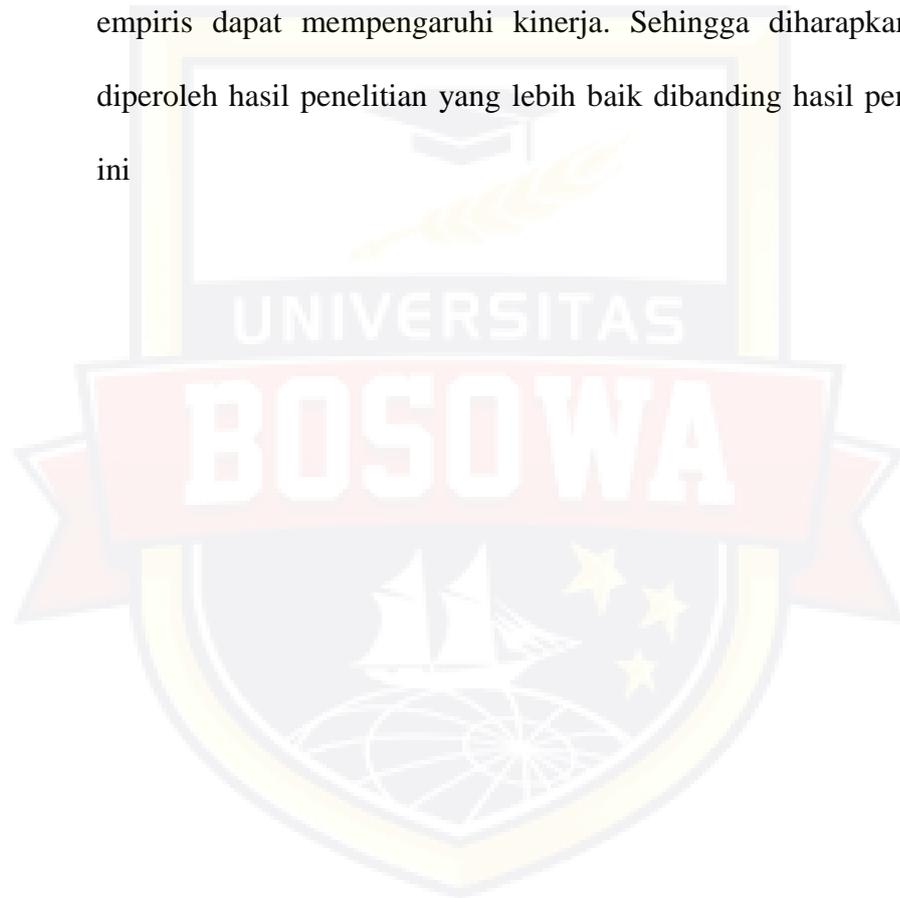
1. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.
2. Sistem pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.
3. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran untuk mengatasi dan mengurangi kelemahan yang terjadi, yaitu sebagai berikut ;

1. Pengelolaan Akuntabilitas yang baik akan membuat Pengelolaan APBD menjadi lebih baik, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan yang bersifat positif dalam mengurangi dampak seperti melakukan kegiatan relaksasi rutin bagi pegawai setiap minggunya.
2. Pentingnya meningkatkan suasana lingkungan kerja yang baik dalam membantu meningkatkan Pengelolaan APBD Lebih hati hati

3. Bagi penelitian lain yang berniat melakukan penelitian ulang atau penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, diharapkan dapat melakukan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis data yang lebih lengkap atau dengan menambahkan beberapa variabel yang secara teoritis maupun empiris dapat mempengaruhi kinerja. Sehingga diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dibanding hasil penelitian ini



## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, and Miah Said. "Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah." Pusaka Almaida, 2021.  
<https://bacirokel.jogjakota.go.id/detail/index/9027>
- Irham Fahmi. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal / Irham Fahmi*. Jakarta :: Mitra Wacana Media,.
- Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Mardian, Ike Roza, and Yurniwati Yurniwati. "The Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6.4 (2022): 3939-3949.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi sektor publik*, Andi: Yogyakarta.
- Mudjiyono, Mudjiyono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah." *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)* 4.2 (2019): 64-71.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
- Permata, Amira Intania, M. Thoyib M. Thoyib, and M. Husni Mubarak. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan." *JOURNAL*

*SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543 3.7 (2022): 963-970.*

Permendagri No. 21 tahun 2010

Prasetyantoko, A. (2008). *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian–Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Wahida, N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi)*. Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

**L**

**A**

**M**

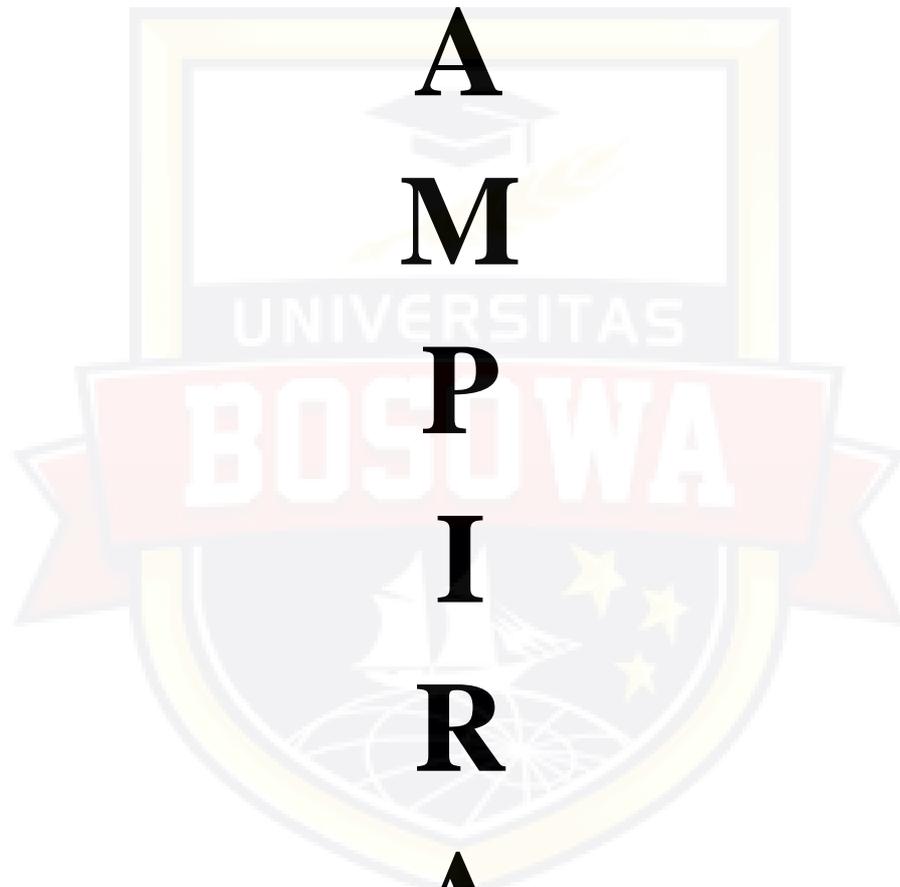
**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran Surat permohonan penelitian



# UNIVERSITAS BOSOWA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568  
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A.079FEB/UNIBOS/IV/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,  
 Bapak/Ibu Kepala  
 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di, -  
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Dela Navary  
 NIM : 4519012158  
 Program Studi : Manajemen  
 No. Tlp/HP : 085338730186

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 27 April 2023  
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
 Ub. Wakti Dekan

  
 Indrayati Nur, SE, M.Si  
 NIDN: 0905097702

Tembusan  
 1. Rektor Universitas Bosowa  
 2. Arsip

## Lampiran Surat Rekomendasi penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Rante Kesu' No.2 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmpstp.torut@gmail.com  
 Website : http://dpmpstptorajautarakab.go.id

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : *Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa*

Menunjuk Surat *Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa* Nomor : *A.0574/FEB/UNIBOS/IV/2023*, Perihal Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : *Dela Navary*  
 Nomor Pokok : *4519012158*  
 Program Studi : *Manajemen*  
 Alamat : *Tallunglipu*

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan Judul; **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBD KABUPATEN TORAJA UTARA** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **12 Juni 2023** sampai **30 Juni 2023**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 ( satu ) dokumen *copy* hasil " Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 7 Juni 2023  
**KEPALA DPMPTSP,**  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara di Marante;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa di Makassar;
5. Peringgal;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

CS Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran Surat Izin penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

*Alamat: Komplekx Perkantoran Gabungan Dinas, Badan Jl. Poros Rantepao - Palopo Tandon Toraja Utara*

**SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 900.970 / 367 /BKAD/ VI /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : IRMAWATI PATANDUNG, SE., Ak.MH  
NIP : 19720407 200212 2 003  
Jabatan : Kepala Badan

Menyatakan tidak keberatan dan memberi izin kepada:

N a m a : DELA NAVARY  
Nomor Pokok : 4519012158  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa  
Program Studi : Manajemen  
Program Pendidikan : S1  
Alamat : Tallunglipu

Untuk mengadakan **Penelitian** dalam rangka **Skripsi** dengan judul *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara* di Kantor BKAD Kabupaten Toraja Utara terhitung mulai tanggal **12 s/d 30 Juni 2023**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 12 Juni 2023



**IRMAWATI PATANDUNG, SE., Ak.MH**  
Pangkat Pembina TK.I, IV/b  
NIP : 19720407200212003

No	JENIS KELA MIN	UMUR	PENDIDIKAN	MASA BEKERJA	Disiplin_Kerja_(X1)										Kemampuan_Teknologi_(X2)										Kinerja_Pegawai_(Y)										
					X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
					Skor 5 (SS), 4 (S), 3 (KS), 2 (TS), 1 (STS)										Skor 5 (SS), 4 (S), 3 (KS), 2 (TS), 1 (STS)										Skor 5 (SS), 4 (S), 3 (KS), 2 (TS), 1 (STS)										
1	Laki-laki	41-50 Tahun	S1	16-25 Tahun	5	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	
2	Laki-laki	41-50 Tahun	S1	16-25 Tahun	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	
3	Laki-laki	51-60 Tahun	SMK	26-35 Tahun	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4		
4	Perempuan	21-30 Tahun	S1	1-5 Tahun	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4		
5	Laki-laki	21-30 Tahun	S1	1-5 Tahun	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	
6	Laki-laki	51-60 Tahun	S1	26-35 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4		
7	Laki-laki	31-40 Tahun	S1	1-5 Tahun	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4		
8	Laki-laki	41-50 Tahun	S1	6-15 Tahun	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4		
9	Laki-laki	41-50 Tahun	S1	16-25 Tahun	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	
10	Laki-laki	41-50 Tahun	SMK	6-15 Tahun	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	Laki-laki	51-60 Tahun	S2	16-25 Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4		
12	Perempuan	31-40 Tahun	S2	6-15 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4		
13	Perempuan	51-60 Tahun	S1	26-35 Tahun	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	
14	Perempuan	31-40 Tahun	S1	6-15 Tahun	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	
15	Laki-laki	51-60 Tahun	S2	26-35 Tahun	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	
16	Perempuan	41-50 Tahun	S1	6-15 Tahun	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	
17	Laki-laki	21-30 Tahun	S1	1-5 Tahun	5	5	4	4	3	5	4	5	4	5	5	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	
18	Laki-laki	41-50 Tahun	S2	16-25 Tahun	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	
19	Laki-laki	41-50 Tahun	S1	16-25 Tahun	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	
20	Perempuan	41-50 Tahun	S2	6-15 Tahun	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4
21	Laki-laki	31-40 Tahun	S1	6-15 Tahun	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	
22	Laki-laki	51-60 Tahun	S1	26-35 Tahun	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	
23	Laki-laki	41-50 Tahun	S1	16-25 Tahun	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	
24	Perempuan	51-60 Tahun	S1	26-35 Tahun	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5



Lampiran data SPSS

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,559**	,447**	,423**	,199	,297*	,297*	,444**	,366**	,124	,719**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,002	,167	,036	,036	,001	,009	,390	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	,559**	1	,557**	,366**	,167	,254	,346*	,339*	,305*	-,017	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,009	,245	,075	,014	,016	,031	,908	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	,447**	,557**	1	,387**	,011	,031	,084	,216	,404**	,147	,563**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,005	,941	,833	,564	,133	,004	,307	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	,423**	,366**	,387**	1	,092	,295*	,261	,295*	,481**	,193	,607**
	Sig. (2-tailed)	,002	,009	,005		,524	,038	,067	,037	,000	,179	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	,199	,167	,011	,092	1	,749**	,599**	,489**	,417**	,398*	,598**
	Sig. (2-tailed)	,167	,245	,941	,524		,000	,000	,000	,003	,004	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.6	Pearson Correlation	,297*	,254	,031	,295*	,749**	1	,521**	,480**	,400**	,249	,630**
	Sig. (2-tailed)	,036	,075	,833	,038	,000		,000	,000	,004	,081	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.7	Pearson Correlation	,297*	,346*	,084	,261	,599**	,521**	1	,572**	,305*	,030	,596**
	Sig. (2-tailed)	,036	,014	,564	,067	,000	,000		,000	,031	,837	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.8	Pearson Correlation	,444**	,339*	,216	,295*	,489**	,480**	,572**	1	,421**	,042	,636**
	Sig. (2-tailed)	,001	,016	,133	,037	,000	,000	,000		,002	,774	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.9	Pearson Correlation	,366**	,305*	,404**	,481**	,417**	,400**	,305*	,421**	1	,492*	,723**
	Sig. (2-tailed)	,009	,031	,004	,000	,003	,004	,031	,002		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.10	Pearson Correlation	,124	-,017	,147	,193	,398**	,249	,030	,042	,492**	1	,436**
	Sig. (2-tailed)	,390	,908	,307	,179	,004	,081	,837	,774	,000		,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL_X1	Pearson Correlation	,719**	,687**	,563**	,607**	,598**	,630**	,596**	,636**	,723**	,436*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



X2.7	Pearson Correlation	,025	,150	,668**	,143	,094	,208	1	,255	,208	,150	,527**
	Sig. (2-tailed)	,865	,297	,000	,322	,515	,147		,074	,147	,297	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.8	Pearson Correlation	-,063	,077	,068	,232	-,128	,198	,255	1	,002	,077	,377**
	Sig. (2-tailed)	,666	,597	,638	,105	,374	,167	,074		,987	,597	,007
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.9	Pearson Correlation	,230	,139	,258	,061	,545**	,192	,208	,002	1	,139	,501**
	Sig. (2-tailed)	,108	,336	,070	,674	,000	,181	,147	,987		,336	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.10	Pearson Correlation	,431**	1,000**	,107	,257	,038	,963**	,150	,077	,139	1	,758**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,459	,072	,795	,000	,297	,597	,336		,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL_X2	Pearson Correlation	,473**	,758**	,453**	,433**	,367**	,795**	,527**	,377**	,501**	,758**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001	,002	,009	,000	,000	,007	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,132	,103	,229	,158	,530**
	Sig. (2-tailed)		,362	,477	,110	,272	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.2	Pearson Correlation	,132	1	,149	,535**	,154	,695**
	Sig. (2-tailed)	,362		,302	,000	,286	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.3	Pearson Correlation	,103	,149	1	,072	,038	,524**
	Sig. (2-tailed)	,477	,302		,621	,795	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.4	Pearson Correlation	,229	,535**	,072	1	-,070	,614**
	Sig. (2-tailed)	,110	,000	,621		,631	,000
	N	50	50	50	50	50	50
X3.5	Pearson Correlation	,158	,154	,038	-,070	1	,459**
	Sig. (2-tailed)	,272	,286	,795	,631		,000
	N	50	50	50	50	50	50
TOTAL_X3	Pearson Correlation	,530**	,695**	,524**	,614**	,459**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	TOTAL_ Y
Y1	Pearson Correlation	1	,555**	,430**	,409**	,228	,345*	,319*	,429**	,358*	,120	,722**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,003	,112	,014	,024	,002	,011	,405	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y2	Pearson Correlation	,555**	1	,556**	,366**	,172	,278	,348*	,339*	,305*	-,022	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,009	,232	,050	,013	,016	,031	,881	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y3	Pearson Correlation	,430**	,556**	1	,405**	,007	,073	,079	,234	,412**	,123	,561**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,004	,963	,613	,586	,103	,003	,394	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y4	Pearson Correlation	,409**	,366**	,405**	1	,076	,275	,245	,295*	,481**	,205	,599**
	Sig. (2-tailed)	,003	,009	,004		,601	,053	,087	,037	,000	,154	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y5	Pearson Correlation	,228	,172	,007	,076	1	,780**	,612**	,463**	,405**	,406**	,603**
	Sig. (2-tailed)	,112	,232	,963	,601		,000	,000	,001	,004	,003	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y6	Pearson Correlation	,345*	,278	,073	,275	,780**	1	,550**	,463**	,405**	,316*	,666**
	Sig. (2-tailed)	,014	,050	,613	,053	,000		,000	,001	,004	,025	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y7	Pearson Correlation	,319*	,348*	,079	,245	,612**	,550**	1	,550**	,297*	,038	,601**
	Sig. (2-tailed)	,024	,013	,586	,087	,000	,000		,000	,036	,793	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y8	Pearson Correlation	,429**	,339*	,234	,295*	,463**	,463**	,550**	1	,421**	,053	,627**
	Sig. (2-tailed)	,002	,016	,103	,037	,001	,001	,000		,002	,716	,000

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y9	Pearson Correlation	,358*	,305*	,412**	,481**	,405**	,405**	,297*	,421**	1	,501**	,718**
	Sig. (2-tailed)	,011	,031	,003	,000	,004	,004	,036	,002		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y10	Pearson Correlation	,120	-,022	,123	,205	,406**	,316*	,038	,053	,501**	1	,441**
	Sig. (2-tailed)	,405	,881	,394	,154	,003	,025	,793	,716	,000		,001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,722**	,687**	,561**	,599**	,603**	,666**	,601**	,627**	,718**	,441**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Uji Reliability Statistics

X1

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,801	10

X2

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,726	10

X3

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,655	5

Y

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,803	10

### Uji Descriptive Statistics

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aksesibilitas_Laporan_Keuangan	50	28	50	41,14	4,305
Sistem_Pengendalian_Internal	50	32	46	38,28	2,756
Penyajian_Laporan_Keuangan	50	16	23	19,58	1,326
Akuntabilitas	50	28	50	41,20	4,324
Valid N (listwise)	50				

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,41986040
Most Extreme Differences	Absolute	,413
	Positive	,413
	Negative	-,097
Test Statistic		,413
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## Uji Linearitas

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas * Aksesibilitas_Laporan_Keuangan	Between Groups	(Combined)	908,800	17	53,459	237,595	,000
		Linearity	907,180	1	907,180	4031,912	,000
		Deviation from Linearity	1,620	16	,101	,450	,954
	Within Groups	7,200	32	,225			
Total			916,000	49			

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas * Sistem_Pengendalian_Internal	Between Groups	(Combined)	216,581	11	19,689	1,070	,410
		Linearity	97,227	1	97,227	5,282	,027
		Deviation from Linearity	119,354	10	11,935	,648	,763
	Within Groups	699,419	38	18,406			
Total			916,000	49			

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas * Penyajian_Laporan_Keuangan	Between Groups	(Combined)	92,863	7	13,266	,677	,690
		Linearity	53,340	1	53,340	2,722	,106
		Deviation from Linearity	39,523	6	6,587	,336	,914
	Within Groups	823,137	42	19,599			
Total			916,000	49			

**UJI T****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,1261	1,286		,403	,840
	Aksesibilitas_Laporan_Keuangan	,492	,116	,388	6,474	,000
	Sistem_Pengendalian_Internal	,248	,025	,214	3,874	,000
	Penyajian_Laporan_Keuangan	,237	,051	-,047	,529	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

**UJI F****ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	907,362	3	302,454	61,688	,000 <sup>b</sup>
	Residual	8,638	46	,188		
	Total	916,000	49			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Penyajian\_Laporan\_Keuangan, Aksesibilitas\_Laporan\_Keuangan, Sistem\_Pengendalian\_Internal

**UJI DETERMINASI****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 <sup>a</sup>	,891	,890	,433

a. Predictors: (Constant), Penyajian\_Laporan\_Keuangan,

Aksesibilitas\_Laporan\_Keuangan, Sistem\_Pengendalian\_Internal